

Daftar Isi

Pengantar Penulis -- v

Pengantar Penerbit -- vii

Bagian 1. Penjelasan Umum dan Sistem Pajak -- 1

A. Definisi Pajak dan Hukum Pajak -- 1

B. Penggolongan Pajak -- 4

C. Sistem Pemungutan Pajak -- 7

D. Asas Pemungutan Pajak -- 8

E. Cara Pemungutan Pajak -- 8

F. Syarat Pemungutan Pajak -- 9

G. Undang–Undang Perpajakan -- 10

H. Teori Perpajakan -- 11

I. Fungsi Pajak -- 13

J. Tarif Pajak -- 14

K. Hutang Pajak -- 15

L. Perlawanan Pajak -- 16

M. Kepatuhan Pajak -- 18

N. Kebijakan Perpajakan -- 19

Bagian 2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan -- 21

A. Deskripsi Singkat -- 21

B. NPWP dan Pengukuhan PKP -- 23

- C. Pembukuan dan Pencatatan -- 29
 - D. Surat Pemberitahuan (SPT) -- 31
 - E. Pembayaran Pajak -- 39
 - F. Pemeriksaan Pajak -- 42
 - G. Penetapan dan Ketetapan -- 46
 - H. Surat Ketetapan Pajak (SKP) -- 47
 - I. Surat Tagihan Pajak (STP) -- 48
 - J. Sengketa Pajak -- 49
 - K. Keberatan -- 51
 - L. Penyelesaian di Pengadilan Pajak -- 51
 - M. Penyelesaian di Mahkamah Agung -- 52
 - N. Tindak Pidana Perpajakan dan Penyidikan -- 53
-

Bagian 3. Pajak Penghasilan -- 76

- A. Subjek Pajak Dalam dan Luar Negeri -- 76
 - B. Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif -- 79
 - C. Tidak Termasuk sebagai Subjek Pajak -- 80
 - D. Objek Pajak Penghasilan -- 81
 - E. Penghasilan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak -- 83
 - F. Penghasilan yang Dikenai Pajak Bersifat Final -- 86
 - G. Tarif PPh Pasal 17 sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 -- 86
 - H. Keringanan Tarif PPh Pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008 -- 87
 - I. Tarif PPh Sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 -- 87
 - J. Insentif Pajak -- 87
-

Bagian 4. Pajak Penghasilan Pasal 21 -- 90

- A. Pihak yang Ditunjuk Sebagai Pemotong PPh Pasal 21 -- 91
- B. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 -- 92
- C. Penerima Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 -- 93
- D. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 -- 93

- E. Tidak Termasuk Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 -- 95
- F. Ketentuan yang Harus Dilakukan Pemotong PPh Pasal 21 -- 96
- G. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 -- 97
- H. Penyampaian SPT Elektronik -- 100
- I. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 -- 102

Bagian 5. Pajak Penghasilan Pasal 22, 23/26, 24, 25 -- 120

- A. Pajak Penghasilan Pasal 22 -- 120
- B. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 -- 121
- C. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 -- 121
- D. Tarif PPh Pasal 22 -- 124
- E. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 -- 129
- F. Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22 -- 134
- G. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 -- 135
- H. Pajak Penghasilan Pasal 23 -- 138
- I. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23 -- 138
- J. Penghasilan sebagai Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 -- 139
- K. Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23 -- 142
- L. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 -- 143
- M. Kewajiban Pemotong -- 144
- N. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 -- 144
- O. Pajak Penghasilan Pasal 24 -- 149
- P. Penggabungan Penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri -- 149
- Q. Mekanisme Pengkreditan -- 149
- R. Pajak Penghasilan Pasal 25 -- 153
- S. Pajak Penghasilan Pasal 26 -- 160
- T. Administrasi dan Pembukuan -- 163

Bagian 6. Aplikasi Perhitungan Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi -- 164

- A. Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi -- 164
 - B. Tempat dan Batas Waktu Penyampaian SPT -- 165
 - C. Definisi Penghasilan -- 166
 - D. Pembukuan dan Pencatatan -- 169
 - E. Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (PPH Pasal 25) -- 170
 - F. Jenis-jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi -- 171
-

Bagian 7. Pajak Penghasilan Khusus -- 173

- A. Pajak Penghasilan yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final -- 173
- B. Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI -- 178
- C. Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan -- 180
- D. Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi -- 182
- E. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan -- 186
- F. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan -- 187
- G. Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi -- 192
- H. Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara -- 195
- I. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek -- 197
- J. Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya -- 199
- K. Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri -- 200
- L. Pajak Penghasilan dari Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23 Tahun 2018) -- 200
- M. Norma Penghitungan -- 205

- N. Pajak Penghasilan Pasal 15 -- 212
- O. Pajak Penghasilan Pasal 19 -- 217
- P. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak -- 219
- Q. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 19 -- 223
- R. Perlakuan Akuntansi -- 223

Bagian 8. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) -- 225

- A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) -- 225
- B. Subjek Pajak Pertambahan Nilai -- 228
- C. Objek PPN -- 230
- D. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai -- 238
- E. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai -- 239
- F. Faktur Pajak -- 243
- G. Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis -- 253
- H. Kegiatan Membangun Sendiri yang Dikenakan PPN -- 254
- I. Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran -- 256
- J. Pedagang Emas Perhiasan -- 259
- K. Jasa Persewaan Ruangan -- 261
- L. PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Sesuai PMK No. 48 Tahun 2020 -- 263
- M. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) -- 265
- N. Contoh Cara Menghitung PPN & PPnBM -- 271
- O. PPnBM Dibebaskan Aras Impor dan Penyerahan -- 274

Bagian 9. Rekonsiliasi Fiskal -- 275

- A. Penyebabkan Munculnya Koreksi Fiskal -- 275
- B. Mekanisme/Siklus Penyelesaian Kewajiban Perpajakan dalam Badan Usaha Selama Satu Tahun -- 278
- C. Koreksi Fiskal Positif -- 279
- D. Koreksi Fiskal Negatif -- 282

Bagian 10. Aplikasi Perhitungan Pajak Untuk Wajib Pajak Badan dan Penyajian Pajak dalam Laporan Keuangan -- 283

- A. Langkah Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Sesuai PSAK No. 46 -- 285
 - B. Tujuan dan Ruang Lingkup -- 285
 - C. Pengakuan -- 286
 - D. Pengukuran -- 286
 - E. Penyajian -- 289
 - F. Penyusutan dan Amortisasi -- 290
 - G. Harga Perolehan Aset Tetap (Pasal 10 UU PPh) -- 291
 - H. Metode Penyusutan Aset Tetap (Pasal 11 UU PPh) -- 292
 - I. Harta Tak Berwujud yang Dapat Diamortisasi (Pasal 11A UU PPh) -- 293
-

Bagian 11. Bea Meterai -- 295

- A. Terminologi Bea Meterai -- 295
 - B. Objek dan Tarif Bea Meterai -- 296
 - C. Yang Dikecualikan Sebagai Objek Bea Meterai -- 297
 - D. Saat dan Pihak yang Terutang Bea Meterai -- 298
 - E. Cara Pelunasan Bea Meterai -- 299
 - F. Ketentuan Khusus -- 300
 - G. Daluwarsa -- 301
 - H. Pelunasan Bea Meterai dengan Pemeteraian Kemudian -- 302
-

Bagian 12. Pajak Bumi Bangunan -- 305

- A. PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) -- 305
- B. PBB Terutang -- 308
- C. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan -- 309
- D. Contoh Perhitungan PBB -- 310
- E. PBB Sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (PBB P3) -- 311
- F. Tata Cara Penetapan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB -- 316
- G. Pengenaan PBB -- 316
- H. Pengenaan PBB -- 317

Bagian 13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan -- 318

- A. Latar Belakang dan Pengertian -- 318
 - B. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak BPHTB -- 321
 - C. Saat Terutang BPHTB -- 325
 - D. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan -- 326
-

Bagian 14. Pajak dan Retribusi Daerah -- 328

- A. Pajak Daerah -- 328
 - B. Jenis-jenis dan Tarif Pajak Daerah -- 330
 - C. Jenis-jenis Retribusi Daerah Beserta Tarifnya -- 336
-

Glosarium -- 342

Daftar Pustaka -- 361

Tentang Penulis -- 365